KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012627.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. NANA CU`ANA, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 164 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh HJ. NANA CU`ANA, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME disingkat LPKKN tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017082333101174 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME disingkat LPKKN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME disingkat LPKKN
Berkedudukan di KOTA SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 164 Tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh HJ. NANA CU`ANA, S.H., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN KENDAL.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2017

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012627.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ERIK SETIAWAN	3374131205760005	PENGURUS	KETUA UMUM
EDWARD SIHOTANG	3175032404800011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2017

Dipindai dengan CamScanner